

Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Ni Kadek Novi Puspita Dewi^{1*}, Elin Erlina Sasanti¹, Nungki Kartikasari¹

¹ Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

*email: kdknovi24@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of financial management and understanding of local government information systems (SIPD) on the quality of financial reports of the Regional Secretariat of Mataram City. The type of research used in this study is descriptive quantitative research. The sampling technique used in this study is purposive sampling. This study uses primary data taken from distributing questionnaires from 50 respondents at the Regional Secretariat of Mataram City. The data analysis technique used is analysis using the Structural Equation Model (SEM) and Bootstrapping on SMARTPLS 4.0.9.3 software. The results showed that financial management has a positive relationship but insignificant effect on financial quality while understanding of SIPD has a positive and significant effect on the quality of financial statements.

Keywords : financial management, SIPD, financial report quality

ABSTRAK

Kata Kunci:
Financial Management; SIPD; Financial Report Quality

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari penyebaran kuesioner yang berasal dari 50 responden pada Sekretariat Daerah Kota Mataram. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan Bootstrapping pada software SMARTPLS 4.0.9.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan mempunyai hubungan positif tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas keuangan dan pemahaman SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, SIPD, Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut haruslah disajikan secara akurat, relevan, tepat waktu serta dapat dipercaya (Defitri, 2018). Informasi keuangan yang berkualitas memerlukan

pengelolaan keuangan yang didukung oleh prosedur pelaporan keuangan yang baik dan memadai sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem informasi akuntansi keuangan (Setyobudi, 2022). Pemahaman yang baik mengenai sistem akuntansi yang digunakan pada suatu pemerintah daerah diperlukan untuk menghindari kecurangan dan kelalaian agar nantinya dapat menciptakan suatu laporan keuangan yang berkualitas (Yusup, 2016).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dicetuskan oleh Milgram (1963) mengatakan bahwa lembaga atau seseorang taat kepada perintah atau aturan yang telah ditetapkan sehingga, lembaga tersebut dianggap konsisten dengan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan teori kepatuhan, pemerintah daerah harus memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dipublikasikan. Hal ini diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah sehingga pada saat menyusun APBD, SIPD dapat lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel. Berdasarkan peraturan ini Kementerian Dalam Negeri mengatur sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu SIPD yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Prameswari, 2021). Implementasi SIPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh pemerintah daerah secara nasional (www.bpk.go.id).

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa program di wilayah Jember yang tidak dapat dilaksanakan seperti anggaran Rp 4 miliar untuk pembangunan dua pabrik pupuk organik dan realisasi dana pasien SPM (Surat Pernyataan Miskin) sebesar Rp 20 miliar. Terdapat juga kelemahan lain seperti, notifikasi kadang tidak jalan, proses input yang kadang tidak tersimpan, dan kendala perencanaan lainnya (radarjember.jawapos.com). SIPD di Kabupaten Sumbawa Barat masih memiliki keluhan dan sangat sulit terutama untuk sistem pengelolaannya karena aplikasi ini masih belum mengatur secara detail bagaimana setiap anggaran dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran seperti gaji pegawai (suarantb.com). Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun oleh pemerintah belum optimal yang kemungkinan dapat terjadi akibat human eror atau gangguan dalam aplikasinya. Kendala tersebut membuat beberapa program mengalami kegagalan dan banyak pengajuan dalam perubahan APBD (radarjember.jawapos.com).

Penelitian Pasha (2018), Setyobudi (2022), Slamet and Irmadiani (2022), Husna, Maryam, and Ikhbar (2022) serta Defitri (2018) yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Defitri (2018), Setyobudi (2022), Slamet and Irmadiani (2022), (Susanto, 2016), Mustaqmah and Putri (2022), serta Yusup (2016) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan atau SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian Defitri (2018) dan

Leunupun, Persulesy, and Souhuwat (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Ekaputra (2021) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama penerapannya karena kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan penelitian sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Kota Mataram adalah salah satu kota yang menerapkan dan mengoperasikan aplikasi SIPD yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Aplikasi SIPD ini baru diterapkan pada tahun 2022 di Kota Mataram yang sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMD). Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman tentang SIPD yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yaitu mengelola dengan baik kekayaan daerah. Melihat pentingnya peranan dalam pengelolaan dan aturan yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

METODE

Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan, pemahaman sistem informasi pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan yang berada di Sekretariat Daerah Kota Mataram. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari kantor Sekretariat Daerah Kota Mataram dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang menggunakan Skala Likert 4 (empat) poin. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria pegawai yang terlibat langsung dengan proses pengelolaan keuangan dan pengguna sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dengan sampel 50 orang pegawai yang terdiri dari kepala bagian, kepala sub bagian, analis kebijakan dan bendahara/bagian keuangan. Sebelum menyebar kuesioner peneliti melakukan pilot test untuk menguji keefektifan kuesioner sebagai alat komunikasi antara peneliti dan responden. Definisi Operasional Variabel bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep dan Definisi Operasional	Indikator
Pengelolaan Keuangan (X ₁)	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah	1. Akuntabilitas 2. <i>Value for money</i> 3. Kejujuran 4. Transparansi 5. Pengendalian
Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (X ₂)	Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi komputer.	1. Kemudahan Penggunaan SIPD 2. Pencatatan 3. Penggolongan 4. Pelaporan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami

Sumber : Defitri (2018), Vidyasari and Suryono (2021), Waspodo (2018)

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Structural Equation Model* (SEM) untuk menguji Outer Model dan Inner Model serta *Bootstrapping* untuk menguji hipotesis dengan menggunakan *software* SMARTPLS 4.0.9.3. Analisa outer model menggunakan *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*, sedangkan inner model menggunakan analisa R-Square.

HASIL DAN PEMBAHASAN

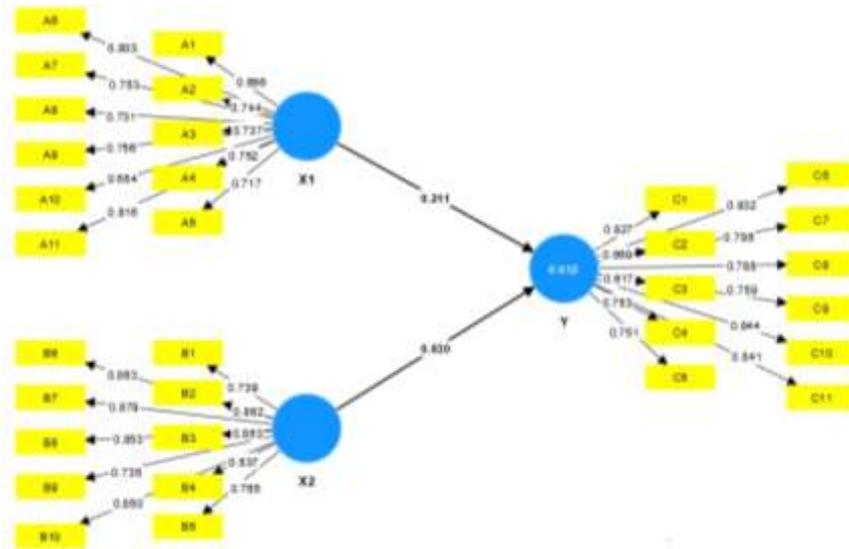
Sebelum menyebar kuesioner dilakukan pilot test untuk menguji coba penelitian dalam skala kecil ke 10 (sepuluh) orang. Hasilnya peneliti mendapat masukan dengan menghapus dan menambah kata yang keliru dan pernyataan yang kurang dipahami. Kuesioner yang disebar sebanyak 50 buah diisi secara lengkap dengan tingkat pengembalian 100% yang berarti pengujian layak untuk dilanjutkan dengan jenis kelamin yang mendominasi adalah perempuan sebanyak 54%, menempuh pendidikan S1 sebanyak 62% serta rata-rata responden berusia diatas 40 tahun.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Name	Min	Max	Mean	Standard Deviation
Pengelolaan Keuangan	2	4	3,36	0,51
Pemahaman SIPD	2	4	2,90	0,55
Kualitas LK	2	4	3,19	0,44

Sumber: Data Primer, diolah penulis (2023)

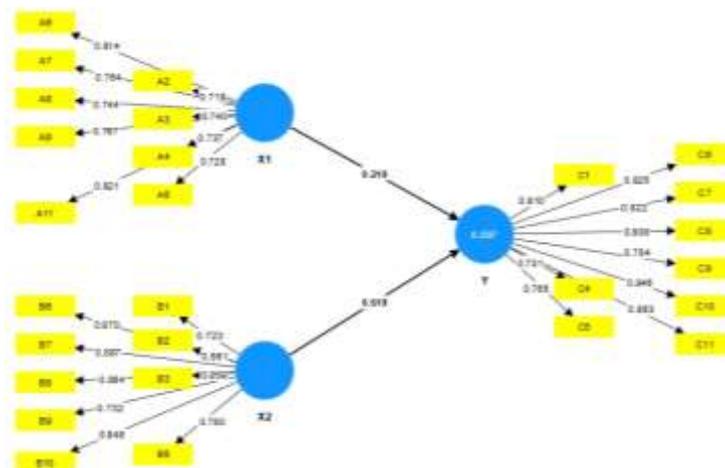
Hasil Uji Pengukuran Model (Outer Model)



Gambar 1. Outer Model Sebelum Outlier

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4.0.9.3

Indikator individu dikatakan valid jika memenuhi asumsi validitas lebih dari 0,50 dan reliabel lebih dari 0,70. Identifikasi outlier dilakukan untuk memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas pada outer model. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan satu atau bahkan lebih indikator (pernyataan) yang kurang memiliki hubungan yang kuat. Pada penelitian ini peneliti outlier ditemukan pada variabel pengelolaan keuangan nomor A1 dan A10, variabel pemahaman SIPD nomor B4, serta variabel kualitas laporan keuangan nomor C2 dan C3. Setelah dilakukan eliminasi outlier pada data maka model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Outer Model Setelah Outlier

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4.0.9.3

Convergent Validity

Convergent validity dapat dilihat dari korelasi antara skor *item* atau indikator konstruksinya. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,50. Pengukuran dengan indikator refleksi menunjukkan adanya perubahan pada suatu indikator dalam suatu variabel jika indikator lain berubah atau dieliminasi dari model. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari semua variabel memiliki data yang valid karena nilai lebih dari 0,50. Output Smart PLS untuk *outer loading* dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. *Outer Loading*

	KUALITAS LK (Y)	PEMAHAMAN SIPD (X2)	PENGELOLAAN KEUANGAN (X1)
A2			0.719
A3			0.740
A4			0.737
A5			0.728
A6			0.814
A7			0.764
A8			0.744
A9			0.767
A11			0.821
B1		0.723	
B2		0.861	
B3		0.859	
B5		0.780	
B6		0.870	
B7		0.887	
B8		0.854	
B9		0.732	
B10		0.848	
C1	0.810		
C4	0.731		
C5	0.765		
C6	0.825		
C7	0.822		
C8	0.808		
C9	0.784		
C10	0.846		
C11	0.863		

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4.0.9.3

Discriminant Validity

Discriminant validity dapat diukur atau dinilai berdasarkan cross loading. Pengujian *Discriminant Validity-Cross Loading* harus menunjukkan nilai indikator yang lebih tinggi dari setiap variabel dibandingkan dengan indikator pada variabel lainnya, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. *Discriminant Validity-Cross Loading*

	KUALITAS LK (Y)	PEMAHAMAN SIPD (X2)	PENGELOLAAN KEUANGAN (X1)
A2	0.346	0.453	0.719
A3	0.413	0.477	0.740
A4	0.458	0.422	0.737
A5	0.346	0.557	0.728
A6	0.466	0.495	0.814
A7	0.475	0.467	0.764
A8	0.526	0.646	0.744
A9	0.556	0.465	0.767
A11	0.534	0.505	0.821
B1	0.408	0.723	0.360
B2	0.600	0.861	0.508
B3	0.652	0.859	0.592
B5	0.575	0.780	0.613
B6	0.703	0.870	0.632
B7	0.642	0.887	0.607
B8	0.780	0.854	0.637
B9	0.495	0.732	0.367
B10	0.651	0.848	0.464
C1	0.810	0.763	0.521
C4	0.731	0.513	0.387
C5	0.765	0.500	0.409
C6	0.825	0.569	0.513
C7	0.822	0.703	0.484
C8	0.808	0.622	0.526
C9	0.784	0.482	0.460
C10	0.846	0.617	0.531
C11	0.863	0.636	0.600

Sumber : Data Olahan SmartPLS 4.0.9.3

Berdasarkan data pada tabel 4.10 setiap item berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukur. Oleh karena itu, evaluasi *discriminant validity-cross loading* terpenuhi. Cara lain untuk mengukur *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE), nilai yang disarankan adalah diatas 0,50. tabel 5 menunjukkan nilai uji validitas yang dilihat dari nilai AVE.

Tabel 5. *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kualitas LK (Y)	0.651	Valid
Pemahaman SIPD (X2)	0.682	Valid
Pengelolaan Keuangan (X1)	0.577	Valid

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4.0.9.3

Composite Reliability

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*, Reliabilitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *composite reliability*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilainya lebih dari 0,70, dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Keterangan
Kualitas LK (Y)	0,939	0,944	Valid
Pemahaman SIPD (X2)	0,951	0,950	Valid
Pengelolaan Keuangan (X1)	0,915	0,925	Valid

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4.0.9.3

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai lebih dari 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki tingkat uji reliabilitas yang tinggi.

Hasil Analisis Model Struktural (Inner Model)

Uji struktural dengan menggunakan SmartPLS ini dimulai dengan melihat nilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen yakni kualitas laporan keuangan sebagai kekuatan prediksi dari model struktural.

Tabel 7. R-Square

	R-Square	R-Square (Adjusted)
Kualitas LK (Y)	0,597	0,580

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4.0.9.3

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa variabel laten pengelolaan keuangan dan pemahaman SIPD mampu menerangkan atau memprediksi 59,7% sedangkan 40,3% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak digunakan.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini menggunakan *bootstrapping* dengan melihat *total effect* yang menunjukkan pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi pada variabel yang dipengaruhi.

Tabel 8. Uji Hipotesis Berdasarkan Total Effects

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O-STDEV)/M)	P Values
Pemahaman SIPD (X2) -> Kualitas LK (Y)	0.619	0.607	0.122	5.066	0.000
Pengelolaan Keuangan (X1) -> Kualitas LK (Y)	0.210	0.229	0.134	1.566	0.059

Sumber : Data Olahan SmartPLS 4.0.9.3

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil skor penyebaran kuesioner kepada 50 orang responden pada variabel pengelolaan keuangan, responden lebih dominan menjawab setuju. Hasil tersebut diperoleh sebesar 60,91%, sedangkan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Mataram mempunyai hubungan positif sebesar 0,210 tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena nilai $P\text{-Value} > 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis 1 (H1) ditolak. Namun, jika taraf signifikannya sebesar 10% atau 0,10 maka H1 dapat diterima karena $P\text{-Value} < 0,10$.

Hasil yang tidak signifikan dari pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dapat disebabkan karena terdapat faktor lain tentang pelaporan keuangan yang tidak dijelaskan dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan menjelaskan suatu kebijakan yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dan memiliki integritas yang tinggi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau ketidaksesuaian anggaran. Hasil dari pengelolaan keuangan yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Mataram sudah sesuai dengan peraturan atau standar akuntansi pemerintah, seperti laporan keuangan yang sudah lengkap yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan realisasi anggaran.

Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menyatakan bahwa lembaga atau individu taat kepada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan maka lembaga tersebut dianggap konsisten dengan norma-norma yang berlaku. Semakin lembaga tersebut taat terhadap peraturan atau kebijakan dalam pengelolaan keuangan maka semakin bagus juga kualitas laporan keuangan. Sekretariat Daerah Kota Mataram patuh terhadap aturan atau kebijakan dalam proses pengelolaan keuangan, seperti APBD tahun 2022 yang dikelola sudah berdasarkan Perda Walikota Mataram No. 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) dan Leunupun, Persulesy, and Souhuwat (2022) serta bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil skor penyebaran kuesioner kepada 50 orang responden pada variabel pengelolaan keuangan, responden lebih dominan menjawab setuju. Hasil tersebut diperoleh sebesar 69,2%, sedangkan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Sekretariat Daerah

Kota Mataram mempunyai hubungan positif sebesar 0,619 dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena nilai P-Value < 0,005, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis 2 (H2) diterima.

Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menyatakan bahwa lembaga atau individu taat kepada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan maka lembaga tersebut dianggap konsisten dengan norma-norma yang berlaku. Semakin baik pemahaman seseorang tentang sistem informasi pemerintah daerah yang digunakan sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sekretariat Daerah Kota Mataram menggunakan SIPD sejak tahun 2022 mengikuti kebijakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut walaupun Sekretariat Kota Mataram masih pada tahap peralihan dari penggunaan SIMD ke SIPD tetapi pegawai Sekretariat Daerah Kota Mataram rutin mengikuti sosialisasi tentang penggunaan SIPD yang diadakan oleh Badan Keuangan Daerah. SIPD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, meminimalisir laporan keuangan yang dibuat secara manual dan meminimalisir kesalahan yang sudah terintegrasi secara nasional serta mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

SIPD yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku mulai dari pemahaman tentang pencatatan, pengiktisaran, dan penggolongan dengan melakukan posting jurnal sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan tersebut akan tercapai. SIPD yang dikelola secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sudah terintegrasi secara nasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi (2022) yang menyatakan bahwa Pemahaman SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini memberikan bukti bahwa pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Mataram mempunyai hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengandung implikasi bahwa terdapat faktor lain tentang pengelolaan keuangan yang tidak dijelaskan dalam prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang hanya menjelaskan suatu kebijakan yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal serta memiliki integritas yang tinggi. Pegawai Sekretariat Daerah Kota Mataram menggunakan kebijakan tersebut untuk mengevaluasi antara APBD yang dianggarkan dengan yang dicapai untuk meminimalisir terjadinya kecurangan.

Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pemahaman sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Sekretariat Daerah Kota Mataram mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya lembaga/instansi pemerintah wajib paham akan penggunaan SIPD demi mendukung program pemerintah yaitu dapat melihat laporan keuangan hanya dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi secara nasional serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (tidak dibuat secara manual lagi). Kedepannya pegawai pemerintah haruslah paham penggunaan SIPD, paham proses pencatatan, pengikhtisaran, penggolongan sesuai dengan nomor perkiraan akun-akun yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah mendukung serta membimbing penulis hingga artikel ini selesai. Terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah memotivasi serta menyemangati penulis, selanjutnya kepada jajaran pimpinan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram yang telah memberikan ruang, kesempatan, serta peluang untuk pengembangan diri di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 3(2), 6.
- Husna, A., Maryam, & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 9.
- Kamal pasha, A. (2018). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Grobogan)*. 1(2), 274–282.
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner*, 6(3), 1364–1376. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>
- Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). *PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH*

- DAERAH KOTA BUKITTINGGI. *Menara Ekonomi*, ISSN, VIII(1), 181–197.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Permendagri No 70 Tahun 2019)*.
- Prameswari, N. (2021). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP PEROLEHAN OPINI AUDIT BPK TAHUN 2021 DI KABUPATEN PURBALINGGA*. 3(2), 6.
- Setyobudi, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 502–509. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1281>
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 67. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2792>
- Susanto, B. (2016). Total Quality Management, Sistem Pengukuran Kinerja, Penghargaan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 76–83.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Waspodu, L. (2018). Pengaruh Implementasi Software Akuntansi Terhadap Kinerja Pegawai: Perceived Enjoyment Dan Computer Playfulness Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 209–222.
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 10(2), 149–160.